

# ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Ahmad Kamil  
Nuramalia Hasanah, S.E, M.Ak  
Ratna Anggraini S.E, Akt, M.Si, CA.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to know the influence of regional income financing, SiLPA financing, and fiscal ratio toward capital expenditure. The independent variables that used in this research are regional income financing, SiLPA financing, and fiscal ratio. While the dependent variable is capital expenditure.*

*This research used secondary data obtained from local government financial statements that have been published and audited by BPK in 2009-2013 period. Sample that used in this research is 28 regency/city that consist of 18 regencies and 8 cities and the whole observation are 130.*

*The method used in this research is multiple linear regressions. From the analysis t test showed that regional income financing has positive effect toward capital expenditure. SiLPA financing has positive effect toward capital expenditure. Fiscal ratio has positive effect toward capital expenditure. Analysis F test showed regional income financing, SiLPA financing, and fiscal ratio have significant effect capital expenditure.*

**Keyword: regional income financing, SiLPA financing, fiscal ratio, capital expenditure.**

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari system pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada system pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat terwujud.

Tidak hanya itu paradigma pengelolaan keuangan daerah setelah penerapan otonomi telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki yang merupakan bagian dari kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pertumbuhan ekonomi.

Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah tentu tak dapat dipisahkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan fiskal yang besar di era desentralisasi sangat menentukan struktur anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (APBD). Dari substansi sebuah APBD dapat dilihat upaya atau keseriusan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan, atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai.

Perilaku pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan berpengaruh dalam proses penganggaran daerah. Struktur anggaran daerah

mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, terutama jika melihat pada porsi belanja modal. Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2014 mengindikasikan bahwa belanja oleh pemerintah daerah sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja pegawai.

Alokasi belanja modal yang mendapat porsi yang jauh lebih kecil dapat menjadi suatu pertanyaan karena belanja modal merupakan belanja pemerintah yang bersifat produktif dan dapat digunakan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan APBD 2014 rata-rata agregat belanja modal yaitu sebesar 25,86%. Jika dibandingkan dengan rata-rata agregat tersebut hanya 16 provinsi yang memiliki rasio belanja modal lebih dari 25,86% sedangkan 18 provinsi lainnya berada dibawah rata-rata. Menurut Direktorat Jendral Keuangan Daerah (DJKD) Kementerian Dalam Negeri, idealnya alokasi belanja modal adalah 30% dari seluruh total belanja pemerintah daerah ([www.keuda.kemendagri.go.id](http://www.keuda.kemendagri.go.id), 2013).

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas dana perimbangan masih sangat tinggi, yaitu 90% ([www.bisniskeuangan.kompas.com](http://www.bisniskeuangan.kompas.com), 2014). Ringginya tingkat ketergantungan menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan dalam APBD masih bersumber dari transfer pemerintah pusat dan hanya sebagian kecil yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ruang fiskal dalam keuangan daerah mencerminkan fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah

Selain itu menurut laporan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2014 rata-rata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD sebesar 8%. Ini menunjukkan bahwa adanya pengelolaan keuangan yang tidak cermat sehingga anggaran tidak terserap atau bisa juga berarti realisasi penerimaan jauh melebihi target.

Rendahnya alokasi belanja modal, tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer, rendahnya PAD serta rendahnya rasio ruang fiskal diakibatkan oleh masalah dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang belum dikelola dengan baik ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 2014).

Paparan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah serta berbagai macam penelitian terdahulu yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang konsisten. Hal tersebut menjadi celah penelitian (*research gap*) bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan latar belakang diatas, dilakukan penelitian dengan judul : “**Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**”.

## KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 1. BELANJA MODAL

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal merupakan belanja pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan public. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan public yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007 pasal 53 ayat 2, aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal dinilai sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 4 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan ini sejalan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP Nomor 7 yang mengatur tentang akuntansi aset tetap.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomer 2 mengenai Laporan Reliasasi Anggaran, jumlah belanja modal dapat diformulasikan sebagai berikut:

**Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya**

Sedangkan menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2014) belanja modal dapat diperbandingkan dengan keseluruhan total belanja untuk mengukur alokasi belanja modal yang dianggarkan sebagaimana diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal (Zega, 2014). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
- Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Lain-lain pendapatan yang sah yaitu Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Sedangkan Pembiayaan daerah bersumber dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana cadangan daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## 2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2006). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 13 Tahun 2006 Pasal 3 pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Menurut publikasi Analisis dan Deskripsi APBD oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2014) pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui indikator struktur PAD dalam APBD, proporsi pos belanja produktif seperti belanja modal, besarnya SILPA, dana fleksibel yang ditunjukkan dengan ruang fiskal, efisiensi realialisasi anggaran dan efektivitas anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Farci, 2012). Proses penyusunan hingga pengesahan APBD dilakukan pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Kerjasama pemerintah daerah dengan APBD tersebut menunjukkan hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah. Dalam perspektif teori keagenan pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* sedangkan DPRD sebagai *principal*. Hubungan keagenan tersebut didasarkan atas UU Nomer 17 Tahun 2003.

Menurut UU Nomer 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

### KONSEP VALUE FOR MONEY

Organisasi pemerintahan sering disebut sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi pemerintahan memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu (Mardiasmo, 2009):

- a. Ekonomi  
Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi pemerintahan dapat meminimalisasi sumberdaya masukan yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- b. Efisien  
Pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- c. Efektivitas  
Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja tidak cukup. Menurut Mahmudi (2007) perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata. Artinya, penggunaan uang public hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

### ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Implikasi dari penerapan konsep *value for money* dalam organisasi pemerintahan adalah perubahan dalam penganggaran menjadi anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*). Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau *item line budget* dengan pendekatan *incrementalism* ([www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id), 2009). Pendekatan tradisional hanya menekankan pada pos belanja (*object of expenditure*) pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja sehingga tidak memenuhi aspek *value for money* (Nordriawan, 2006).

Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang tidak disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public (Halim & Kusufi, 2012). Oleh karena itu anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan kinerja output.

Upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan

demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

### TINGKAT KEMANDIRIAN

Tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Hidayat, 2013). Tingkat Kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Menurut Hamzah (2008), Tingkat Kemandirian juga dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

### TINGKAT PEMBIAYAAN SiLPA

Tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mengukur penggunaan saldo lebih dari anggaran tahun sebelumnya yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal (DJPK, 2014). Semakin tinggi rasio tingkat pembiayaan SiLPA menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki saldo lebih tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk belanja anggaran tahun berikutnya. Tingkat pembiayaan SiLPA diformulasikan sebagai berikut (Hidayat 2013):

$$\text{Tingkat Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPat} - 1}{\text{Total Belanja}}$$

dimana SiLPA menurut PSAP Nomer 2 didapat dari perhitungan berikut:

$$\text{SiLPA} = (\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Belanja}) + (\text{Penerimaan Pembiayaan} - \text{Pengeluaran Pembiayaan})$$

### RASIO RUANG FISKAL

Rasio Ruang Fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya (Boedi 2012). Rasio Ruang fiskal membandingkan antara ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap keseluruhan total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah (DJPK, 2013). Semakin tinggi nilai ruang fiskal menunjukan pemerintah daerah memiliki fleksibilitas anggaran untuk dapat dialokasikan untuk membiayai hal tertentu. Ruang fiskal diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan daerah dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarket*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga (Sudarwanto 2013).

Sementara Rasio Ruang fiskal didapat dari total pendapatan dikurangi Dana Perimbangan dan dikurangi belanja operasi. Rasio ruang diformulasikan sebagai berikut (Hidayat 2013):

$$\text{Rasio Ruang Fiskal} = \frac{\text{Ruang Fiskal}}{\text{Total Pendapatan}}$$

di mana,

$$\text{Ruang Fiskal} = \text{Pendapatan} - \text{DAK} - \text{Dana Otsus} - \text{Dana Darurat} - \text{Hibah} - \text{Belanja Pegawai} - \text{Belanja Bunga}$$

### 3. KERANGKA TEORITIK

#### A. Hubungan Tingkat Kemandirian dengan Pengalokasian Belanja Modal

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah mengandalkan PAD sebagai sumber daya untuk membangun daerahnya dapat digunakan Tingkat Kemandirian untuk mengukurnya. Semakin tinggi kemandirian ini berarti pemerintah daerah lebih banyak menggunakan PAD sebagai sumber dana pembangunan. Semakin tinggi tingkat kemandirian juga mengindikasikan ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

#### B. Hubungan Tingkat Pembiayaan SiLPA dengan Pengalokasian Belanja Modal

Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) merupakan dana *idle* yang muncul akibat adanya selisih realisasi anggaran dengan target anggaran pada tahun sebelumnya. SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun berkenaan apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### C. Hubungan Rasio Ruang Fiskal dengan Pengalokasian Belanja Modal

Rasio Ruang Fiskal menggambarkan fleksibilitas anggaran yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah. Rasio ruang fiskal sendiri membandingkan ruang fiskal dengan seluruh total pendapatan. Dimana ruang fiskal merupakan keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dikurangi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana darurat, hibah dan belanja rutin. Ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah

juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah.

## METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data dalam penelitian ini adalah 19 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan LKPD yang sudah diaudit selama tahun 2009-2013. Namun karena salah satu kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten pemekaran yang baru berdiri pada 2012 maka jumlah kabupaten yang digunakan berkurang satu sehingga keseluruhan populasi dalam penelitian ini ada 26 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 8 Kota. LKPD tersebut juga harus memiliki kelengkapan elemen variable terutama SiLPA, karena SiLPA merupakan sisa anggaran sehingga tidak selalu terdapat sisa anggaran. Dalam penelitian ini LKPD kabupaten kota keseluruhannya memiliki SiLPA.

Adapun pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai populasi karena provinsi ini merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak sehingga diiharapkan merepresentasikan kabupaten kota se-Indonesia. Batasan tahun 2009-2013 dipilih agar tetap relevan dengan kondisi saat penelitian ini berlangsung. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten kota yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel.

## TEKNIK ANALISIS DATA

Hubungan antara Belanja Modal dan proksi dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio ruang fiskal yaitu:

$$BM = \beta_0 + \beta_1 KM + \beta_2 SiLPA + \beta_3 RF + \epsilon$$

Keterangan:

- $\beta_0$  = Koefisien regresi konstanta.
- $\beta_1, 2, 3$ , = Koefisien regresi masing-masing proksi.
- BM = Belanja Modal.
- KM = Tingkat Kemandirian.
- SiLPA = Tingkat Pembiayaan SiLPA
- RF = Rasio Ruang Fiskal.
- $\epsilon$  = *error*

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Goodness of Fit Model. Uji Goodness of Fit Model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual. Secara statistik, terdapat beberapa cara untuk mengukur goodness of fit, yaitu dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

## HASIL ANALISIS DATA

### 1. STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif dari 130 observasi yang dijadikan sebagai sampel dapat dilihat dari tabel IV.2 berikut ini.

**Tabel IV.2 Hasil Analisis Deskriptif**

Sample: 1130				
	BM	KM	SILPA	RF
Mean	0.171139	0.132865	0.097843	0.325073
Median	0.156919	0.106210	0.083185	0.315697
Maximum	0.372982	0.330947	0.408322	0.574779
Minimum	0.053333	0.036644	0.002745	0.044738
Std. Dev.	0.065165	0.075388	0.067078	0.113229
Skewness	0.954328	0.968718	1.309488	0.018814
Kurtosis	3.734725	3.008056	5.769313	2.313425
Sum	22.24812	17.27248	12.71956	42.25943
Sum Sq. Dev.	0.547802	0.733154	0.580428	1.653886
Observations	130	130	130	130

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

Belanja Modal diukur dengan jumlah alokasi belanja modal dibagi jumlah keseluruhan total belanja dalam anggaran tahun berjalan. Jumlah rata-rata yang didapat dari belanja modal adalah 0,1711 atau 17,11%. Standar deviasi sebesar 0,065 menunjukkan besarnya jarak rata-rata pendapatan asli daerah terhadap rata-rata.

Tingkat Kemandirian diukur dengan membagi pendapatan asli daerah dengan keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah. Nilai rata-rata tingkat kemandirian sebesar 0,1328 atau 13,28%.

Tingkat pembiayaan SiLPA diukur dengan membagi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan total belanja pada tahun berjalan. Nilai rata-rata tingkat pembiayaan SiLPA sebesar 0,097 menunjukkan bahwa pembiayaan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar 9,7%. Artinya sebesar 9,7% keseluruhan total belanja dapat dibiayai melalui pembiayaan SiLPA tahun lalu. Standar deviasi sebesar 0,067 menunjukkan besarnya jarak rata-rata pendapatan asli daerah terhadap rata-rata hitung (*mean*). Nilai maksimum sebesar 0,408 atau sebesar 40,8% dimiliki oleh kabupaten bekasi pada LKPD tahun 2009.

Rasio Ruang fiskal merupakan dana fleksibel yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan salah satunya pembangunan infrastruktur. Nilai rata-rata ruang fiskal yang dimiliki sebesar 0,325 atau 32,5% ini berarti rata-rata pemerintah daerah memiliki dana fleksibel hampir sepertiga dari total anggaran. Standar deviasi sebesar 0,113 menunjukkan besarnya jarak rata-rata pendapatan asli daerah terhadap rata-rata hitung (*mean*). Nilai maksimum sebesar 0,574 atau 57,4% dimiliki oleh Kabupaten Bekasi tahun 2013

## ANALISIS REGRESI BERGANDA.

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik selanjutnya dapat melakukan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan silpa dan ruang fiskal terhadap belanja modal. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil regresi berganda

**TABEL HASIL REGRESI**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.052935	0.015615	3.389916	0.0006
KM	0.229951	0.087378	2.631679	0.0096
SILPA	0.303767	0.072127	4.211530	0.0000
RF	0.178208	0.050421	3.534394	0.0006

.sumber: output eviews 8.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang disajikan dalam Tabel IV.8, dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.0529 + 0.2299 \text{ KM} + 0.3037 \text{ SILPA} + 0.1782 \text{ RF} + e$$

### PENGUJIAN HIPOTESIS 1

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel diatas, variable tingkat kemandirian memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0096 (<0.05). Hasil ini jelas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh terhadap belaja modal. Selain dari nilai signifikansi, dapat juga dilihat dari perbandingan t tabel dan t hitung, yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,63 > 1.979$ ). Dengan demikian maka H1 yang menyatakan bahwa rasio kemandirian memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja modal diterima.

Tingkat kemandirian merupakan indikator untuk mengukur ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian ini diukur dengan seberapa besar porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total keseluruhan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Adapun sumber pendapatan pemerintah daerah terbagi menjadi tiga bagian yaitu, PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah. PAD merupakan sumber dana internal yang diperoleh dari sumber potensi penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi daerah. Sedangkan Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain yang sah merupakan sumber pendapatan eksternal.

Berbeda dengan PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang telah ditentukan peruntukannya. Hal ini karena kedua sumber dana ini bersumber dari pihak eksternal, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang penuh atas penggunaan dana ini (Kusnandar, 2012). Sedangkan PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi penerimaan pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana tersebut seluas-luas. Semakin besar PAD yang dihasilkan semakin besar pula dana yang dapat dialokasikan untuk penyediaan dan penyempurnaan seluruh infrastruktur daerah yang bermuara pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidupnya dan melakukan kegiatan usaha sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Dengan demikian peningkatan PAD selain menurunkan ketergantungan terhadap pemerintah daerah juga menambah sumber pendanaan untuk pembangunan, pelayanan serta kegiatan pemerintah daerah.

Meskipun secara hasil statistik menunjukkan bahwa rata-rata 13,2% yang berarti dalam kategori menurut Nurhayati (2010) termasuk kriteria kurang, namun hasil regresi menunjukkan bahwa dengan tingkat kemandirian tersebut tetap berpengaruh terhadap alokasi belanja modal yang terus meningkat. Hal itu dikarenakan faktor otonomi daerah dimana daerah yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan daerahnya melalui peningkatan belanja modal (DJPK, 2014). Artinya meskipun pendapatan yang berasal

dari internal yaitu PAD secara persentase terbilang kurang namun itu sangat berharga untuk dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk pembangunan daerah. Hal ini memang erat kaitannya dengan perilaku penganggaran dimana pemerintah kabupaten dan kota dituntut untuk mengalokasikan dana untuk prioritas dengan anggaran yang ada (Ritonga, 2012).

### PENGUJIAN HIPOTESIS 2

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel diatas, variable tingkat pembiayaan SiLPA memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000 (<0.05). Hasil ini jelas menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan silpa berpengaruh terhadap belaja modal. Selain dari nilai signifikansi, dapat juga dilihat dari perbandingan t tabel dan t hitung, yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,21 > 1.979$ ). Dengan demikian maka H1 yang menyatakan bahwa tingkat pembiayaan silpa memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja modal diterima.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan apabila anggaran diperkirakan defisit, maka daerah harus menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dan demikian sebaliknya apabila anggaran diperkirakan surplus, maka daerah harus menetapkan penggunaan surplus tersebut. SiLPA tahun lalu merupakan penerimaan pembiayaan ditahun berikutnya untuk membiayai deficit anggaran tahun tersebut. Dengan demikian besarnya SiLPA tahun lalu dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran deficit anggaran berjalan yang masih mungkin dibiayai oleh pembiayaan netto.

Ditinjau dari teori kinerja keuangan, SiLPA yang besar dapat mengindikasikan kinerja yang baik atau buruk melalui efisien anggaran. Dikatakan kinerja keuangannya baik jika SiLPA berasal dari surplus anggaran, yang artinya realisasi penerimaan melebihi target sehingga penerimaan lebih besar dari belanja. Sedangkan kinerja keuangannya dikatakan kurang baik jika SiLPA terbentuk dari banyaknya belanja yang tidak terealisasi akibat kurang baiknya perencanaan (Hidayat, 2013). Untuk kasus kabupaten dan kota di Jawa Barat, jika melihat pada pencapaian target penerimaan yang cenderung melebihi target pada Grafik IV.3, maka dapat dikatakan kinerja keuangannya relatif baik, sehingga berpotensi membentuk SiLPA untuk tahun bersangkutan. Besarnya porsi SiLPA tahun lalu dalam struktur penerimaan pembiayaan ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja di tahun berikutnya.

### PENGUJIAN HIPOTESIS 3

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel diatas, variable Rasio Ruang Fiskal memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0006 (<0.05). Hasil ini jelas menunjukkan bahwa rasio ruang fiskal berpengaruh terhadap belaja modal. Selain dari nilai signifikansi, dapat juga dilihat dari perbandingan t tabel dan t hitung, yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,53 > 1.979$ ).

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah

dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah (Hidayat, 2013). Merujuk pada konsepnya, ruang fiskal dimaknai sebagai besarnya pendapatan yang tidak terikat (bebas) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan (belanja) tanpa membahayakan kesinambungan fiskal daerah (*fiskal sustainability*). Pendapatan yang bebas atau tidak terikat di sini adalah pendapatan setelah dikurangi pendapatan *earmarked* (pendapatan yang telah ditentukan penggunaannya) dan belanja wajib daerah (seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Ruang fiskal merupakan bagian yang harus mendapat perhatian serius. Ruang fiskal dapat diciptakan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan meningkatkan proporsi PAD kemudian berusaha menekan atau mengurangi pendapatan *earmarked* dan belanja wajib maka akan tercipta ruang fiskal yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh Kabupaten Bekasi tahun 2013 dimana keseluruhan penerimaan pada tahun tersebut menjadi besar karena kontribusi dari PAD yang cukup tinggi, disisi lain pendapatan dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi berkurang sehingga menciptakan ruang fiskal yang diidealkan. Selain itu memperbesar ruang fiskal dapat dilakukan dengan menekan pos belanja pegawai karena rasio ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin (Belanja Pegawai) menurut catatan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2014) secara agregat rata-rata rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah adalah 42%.

Memperbesar Rasio Ruang Fiskal daerah untuk Belanja Modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Selain itu, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah juga dapat mendukung terciptanya Rasio Ruang Fiskal. Oleh karena itu semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur.

## KESIMPULAN

1. Tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi berada dibawah taraf signifikansi sebesar 0,05 yang berarti memiliki arah hubungan positif sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian semakin besar belanja modal. Tingginya tingkat kemandirian menunjukkan besarnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain, semakin besar PAD maka pemerintah kabupaten atau kota memiliki ketersediaan dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemerintahnya, salah satunya

pembangunan infrastruktur berupa bangunan, tanah, jalan dll yang dialokasikan dalam belanja modal.

2. Tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi berada dibawah taraf signifikansi sebesar 0,05 yang berarti memiliki arah hubungan positif sehingga semakin besar tingkat pembiayaan SiLPA semakin besar belanja modal. Hal ini dikarenakan dalam struktur APBD, SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan APBD tahun selanjutnya. Sehingga pemerintah daerah memiliki dana tambahan dari SiLPA yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal.
3. Ruang fiskal berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi berada dibawah taraf signifikansi sebesar 0,05 yang berarti memiliki arah hubungan positif sehingga semakin besar Rasio Ruang Fiskal semakin besar belanja modal. Hal ini karena ruang fiskal menunjukkan besarnya dana fleksibel yang dimiliki pemerintah setelah dikurangi dengan pendapatan yang telah ditentukan penggunaannya. Artinya semakin besar ruang fiskal maka pemerintah kabupaten atau kota memiliki dana fleksibel yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Sampel penelitian belum mencakup semua kabupaten dan kota yang ada di Indonesia secara periode 2009-2013 dikarenakan kekurangan data yang dibutuhkan dari BPK maupun website resmi Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehingga hasil ini belum mewakili dan menggambarkan secara utuh dan kompleks mengenai belanja modal di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan beberapa variabel yang memang berdampak besar bagi belanja modal seperti tingkat kemandirian, SiLPA dan ruang fiskal.

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :

1. Bagi peneliti
  - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah periode penelitian atau lebih spesifik terhadap kabupaten / kota agar hasil penelitian mengenai pendapatan asli daerah lebih luas, akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
  - b. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah seperti tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas.
  - c. Penelitian selanjutnya disarankan juga untuk menggunakan *e-views* dikarenakan program tersebut lebih akurat dalam menghitung penelitian yang berupa data panel serta lebih mudah dan ringkas membantu peneliti untuk dapat membuat penelitian yang lebih baik.

## 2. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Peneliti mengharapkan pemerintah kabupaten dan kotamelakukan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan potensi pajak, retribusi dan sumber daya alam sehingga pemerintah kabupaten dan kota dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Selain itu berdampak juga terhadap besarnya SiLPA yang tercipta sehingga dapat membiayai APBD tahun selanjutnya, dan dapat memperbesar ruang fiskal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Syukriy, dan Abdul Halim. Studi Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2, no. 2 (2006): 17-32.
- Alegre, Juan G. *Decentralization and the Composition of Public*. European University Institute. Spain, 2006.
- Aprizay, Yudi; Darwanis & Arfan, Muhammad. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Aceh. *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* (2014): 140-149
- Bank, World. *Fiscal Policy for Growth and Development: An Interim Report*. 2006.
- Boedi, Soelistijono. Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread* 2, no. 2 (Oktober 2012).
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Both, Kenneth Davey, and Roy Kelly. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Analisis dan Deskripsi Analisis APBD 2014*. Jakarta, 2014
- Dwirandra, & Martini, Kadek. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. 2015. *E-Jurnal Akuntansi Udayana* 10.2 (2015): 426-443.
- Fitri, Vella Kurniasih, M Rasuli, and Alfiati Silfi. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal. *FE Universitas Riau*. Riau, 2013.
- Ghozali, Imam & Dwi Ratmono..*Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Universitas Diponegoro.2013
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS 19*. Edisi 6. Semarang: Universitas Diponegoro.2011
- Hamzah, Ardi. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan*. SNA 11 Pontianak, 2008.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.
- Halim, Abdul, and Syam Kusufi. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Heller, Peter. *Understanding Fiscal Space*. IMF Policy Discussion Paper, 2005.
- Hidayat, Mochamad Fajar. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah FEB UB* 2, no. 2 (2013).
- Joker, Jan, Bartjan Pennink, and Sari Wahyuni. *Mertodologi Penelitian Untuk Master dan Ph.D di Bidang Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Kurrohman, Taufik. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5, no. 1 (2013): 1-11.
- Kusnandar, and Dodik Siswanto. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin, 2012.
- Kusumawati, Vegasari Endah. Faktor-faktor yang Menentukan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Indonesia. *FE UMY*. Yogyakarta, 2010.
- Lind, Douglas, wiliam Marchal, and Samuel Wathen. *Tenik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2007.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009.
- Muhidin, Sambas Ali, and Maman Abdurahman. *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nachrowi, Nachrowi Djalal, and Hardius Usman. *Penggunaan Teknik Ekonometrika*. Jakarta: Grafindo, 2008.
- Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, and Maulidah Rahmawati. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Oktora, Fahri Eka, Jenny Morasa, and Sifrid S Pangemanan. Analisa Konstruksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 4, no. 1 (Juni 2013).

- Ritonga, Irwan Taufiq. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pasca Sarjana UGM, 2012.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Solikin, Ikin. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat*. FPEB UPI 2013. Bandung, 2013.
- Sudarwanto, Adenk. Analisis APBD Tahun 2012. *Jurnal STIE Semarang* 5, no. 1 (Februari 2013).
- Sularso, Havid, and Yanuar E Restianto. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi* 1, no. 2 (2011): 109-124.
- Todaro, Michael P. *Economics For A Developing World*. London: Longman, 1977.
- . *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 1998.
- Wahyono, Teguh. *25 Model Analisis Statistik dengan SPSS 17*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Wandira, Arbie Gugus. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013).
- Yamin, Sofyan, and Heri Kurniawan. *SPSS complete teknik analisis statistik terlengkap dengan SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek, 2011.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- [http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/13/1422439/Ini.Enam.Catatan.BPK.soal.Pengelolaan.Keuangan.Pemerintahan.SBY\\_diakses\\_20\\_Februari\\_2015](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/13/1422439/Ini.Enam.Catatan.BPK.soal.Pengelolaan.Keuangan.Pemerintahan.SBY_diakses_20_Februari_2015)
- <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen> diakses 20 Februari 2015
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628> diakses 2 maret 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/10/31/ne9q77-ternyata-pengelolaan-keuangan-daerah-banyak-masalah> diakses 19 Februari 2015.
- <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/04/04073968/> diakses 10 Januari 2015
- <http://www.wartapriangan.com/kota-tasikmalaya-daerah-termiskin-di-jawa-barat/4417/> Diakses 9 Januari 2015
- <http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/74> Diakses 8 Januari 2015